

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dewasa ini berlangsung sangat cepat dan kompleks mencakup berbagai aspek. Percepatan itu diduga akan lebih meningkat lagi pada masa-masa yang akan datang dengan pola yang lebih rumit seiring dengan dinamika transisional yang terjadi pada masyarakat kita. Kecenderungan ini harus segera diantisipasi, terutama oleh dunia pendidikan yang diakui oleh banyak pihak sebagai agen perubahan (*agent of change*).

Pendidikan, baik sebagai salah satu institusi maupun sebagai proses dalam masyarakat, dirasakan perlu meningkatkan perannya, agar perubahan sosial yang cenderung amat cepat itu mendapatkan arah yang lebih seimbang dan sesuai dengan kebutuhan peradaban umat. Keseimbangan dan kesesuaian itu amat diperlukan agar tidak terjadi apa yang disebut sebagai *cultural lag*, *disorganisasi* dan *disintegrasi sosial*, sebagaimana dikhawatirkan oleh Adiwikarta (1993:15).

Kelambanan budaya, disorganisasi maupun disintegrasi sosial merupakan indikator yang menunjukkan tidak atau kurang berfungsinya sistem sosial. Hal itu, menunjukkan pula akan kurang berfungsinya

lembaga-lembaga sosial sebagai sub-sistem yang menopangnya. Sangat boleh jadi bahwa apa yang dikhawatirkan itu sebenarnya telah terjadi dan sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat kita. Realitas sosial yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan kecenderungan-kecenderungan itu. Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam dekade terakhir, dianggap tidak kondusif bagi pendidikan yang ingin menumbuhkan sikap dan perilaku demokratis.

Kualitas kehidupan berdemokrasi di masyarakat masih memprihatinkan

Nilai-nilai demokrasi yang mestinya menjadi landasan dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dirasakan telah tereduksi. Semakin sering kita saksikan di berbagai media massa baik cetak maupun elektronik, sikap yang mau menang sendiri, suka memaksakan kehendak, kurang mengakui keberadaan pihak lain, sikap toleran yang dirasakan semakin melemah, kurangnya empati dan sensitivitas terhadap penderitaan orang lain, dan banyak lagi indikasi semacam itu.

Upaya perbaikan yang dilakukan membutuhkan kesungguhan dan waktu yang tidak sedikit, meski tetap harus dilakukan. Fungsi-fungsi sistem sosial yang selama ini relatif tertekan dan tidak dapat tersalur, harus digerakkan lebih intensif lagi. Pendidikan politik bagi warga negara

(*citizenship education*) harus lebih ditingkatkan ketepatan arahnya, agar setiap warga negara memiliki kemampuan mendukung terbentuknya masyarakat yang baik (*good society*) dalam bentuk partisipasi yang bertanggung jawab.

Masyarakat yang baik (*good society*) menurut Chamberlin (1992:30) adalah masyarakat yang demokratis, dimana seluruh warga negara merasa berdaya dan merasa memiliki kemampuan (*competent*), memiliki keyakinan diri dan mendapatkan kepercayaan diri (*confident*), dan bertanggung jawab (*responsible*) untuk berpartisipasi dalam ikut menentukan arah perubahan.

Untuk memiliki kemampuan, menurutnya, seorang warga negara haruslah memiliki kecintaan dan kemauan untuk senantiasa meningkatkan pengetahuannya (*knowledgeable*) terutama pengetahuan tentang bagaimana kehidupan ini seharusnya dan bagaimana pula seharusnya perubahan itu dilakukan ke arah yang lebih baik. Untuk mendapatkan kepercayaan diri dan pengakuan seorang warga negara dituntut memiliki pengalaman berkehidupan yang baik berdasarkan norma yang diterima masyarakat. Sedangkan untuk mampu berpartisipasi dan memiliki sikap bertanggung jawab, mereka dituntut kemampuan mengambil keputusan dan menganalisis serta menentukan efek positif dan negatif yang ditimbulkan dari keputusan yang diambilnya.

Baik semangat dan kecintaan untuk selalu meningkatkan pengetahuan, rasa keyakinan diri dalam masyarakat, maupun sikap bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam masyarakat merupakan bidang garapan dan lapangan pendidikan, khususnya pendidikan IPS yang di dalamnya memuat pendidikan demokrasi, dan yang dalam prosesnya dibutuhkan banyak latihan.

Kesenjangan yang ada di sekolah.

Bentuk-bentuk latihan dalam pendidikan demokrasi sebagaimana dimaksudkan di atas, dirasakan masih amat kurang diselenggarakan, baik di sekolah maupun dalam keluarga dan masyarakat. Pendidikan Kewarganegaraan yang secara formal menggarap lapangan ini di sekolah, masih lebih menekankan pada ranah kognitif yang dianggap lebih mudah bagi guru, dari pada latihan-latihan afektif dan psikomotor yang butuh lebih banyak kesungguhan. Sanusi (1998) misalnya secara tegas menunjuk banyaknya kelemahan yang terjadi dalam pembelajaran IPS di sekolah itu, mulai dari aspek tujuan pembelajaran, ruang lingkup, peran dan penampilan guru sampai pada keterkaitan yang seharusnya terjalin antara pembelajaran IPS dengan struktur sistem sosial dan perilaku kemasyarakatan individual, kelompok dan organisasi, baik pada tingkat lokal, nasional maupun global yang signifikan.

Chamberlin (1992) menyebutkan dua hal penting yang mestinya dilakukan dalam pendidikan demokrasi, yaitu adanya model aksi sosial tentang bagaimana seharusnya hidup bermasyarakat dalam pendidikan kewarganegaraan dan pemberian kesempatan yang seimbang bagi subjek didik untuk secara aktif berpartisipasi. Kedua hal itu masih jarang dilakukan dalam sistem pendidikan kita. Itu pulalah yang mungkin mendorong Sanusi (1998) menekankan pendidikan demokrasi dengan istilah yang disebutnya sebagai “demokrasi dengan kecerdasan”.

Perlunya pendidikan demokrasi masyarakat dengan kecerdasan

Pencerdasan masyarakat akan kehidupan demokrasi memang amat diperlukan terlebih lagi dalam kaitannya dengan upaya memantapkan budaya politik warga negara. Mantapnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara berkaitan erat dengan meresapnya budaya politik yang demokratis di kalangan warga negara. Itulah salah satu kesimpulan Almond dan Verba (1965) dari hasil studi yang dilakukannya melalui perbandingan kehidupan politik di beberapa negara. Kesimpulannya itu menyebutkan bahwa Inggris dan Amerika Serikat adalah negara yang memiliki sistem demokrasi yang stabil, dan penyebab stabilitasnya itu adalah karena didukung oleh budaya politik demokratis warga negara yang disebutnya sebagai “civic culture”, yang telah meresap pada diri para

warga negaranya, sehingga mampu mendukung stabilnya sistem politik yang demokratis.

Untuk memantapkan budaya politik yang demokratis, maka demokrasi sebenarnya tidak hanya diperlukan dalam konteks kehidupan politik dalam bernegara, akan tetapi demokrasi juga diperlukan dalam setiap tataran kehidupan masyarakat yang didaiamnya memuat bentuk-bentuk interaksi antar anggotanya, karena dari sinilah sebenarnya sikap dan perilaku demokratis sebagai akar demokrasi itu tumbuh berproses menemukan bentuknya. Dalam konteks ini, sekolah dan demikian pula keluarga sebagai kelompok primer dalam masyarakat memegang peranan penting. Peran kedua lembaga yang seharusnya berjalan saling mendukung ini diyakini amat penting. Di samping sekolah, maka dalam tataran kehidupan keluarga, nilai-nilai demokrasi amatlah diperlukan.

Penghargaan bagi setiap anggota keluarga, kesediaan mendengar dan mengakomodasi pendapat anggota keluarga oleh anggota keluarga lainnya, rasa empati, keyakinan diri dan mendapat pengakuan pihak lain, sikap bertanggung jawab, pengakuan hak-hak setiap anggota keluarga, kesediaan untuk menerima perbedaan dan hal-hal lain yang merupakan sendi demokrasi, amat diperlukan manifestasi dan aplikasinya dalam kehidupan masyarakat.

Keluarga sebagai cerminan masyarakat

Dalam masyarakat memang dibutuhkan kehidupan yang berjalan atas dasar nilai-nilai demokrasi, dan dari sinilah berangkatnya kehidupan sosial yang demokratis itu. Potensi keluarga sebagai unit primer dari masyarakat diyakini akan mampu memancarkan budaya demokrasi itu kepada masyarakat yang lebih luas, dan pada akhirnya kepada masyarakat bangsa dalam suatu negara. Secara hipotetis dapat disebutkan bahwa masyarakat terdiri dari unit-unit terkecil yang bernama keluarga. Karena itu untuk menumbuhkan budaya demokrasi masyarakat haruslah dimulai dari unit-unit kecil sebagai unit primer yang disebut sebagai keluarga itu.

Lebih dari itu, realitas kehidupan masyarakat dan bangsa berpangkal dari denyut kehidupan keluarga sebagai kelompok primer dan komponen intinya. Karena itu, budaya politik seperti dilukiskan Almond dan Verba itu dapat dimulai pengembangannya dari keluarga. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa pengembangan nilai-nilai budaya politik dalam keluarga akan berarti pula pengembangan budaya politik pada tingkat masyarakat. Lagi pula keluarga memiliki potensi yang cukup besar untuk hal ini. Kadarusmadi (1996) menegaskan hal ini dengan mengemukakan bahwa situasi keluarga yang terbina dalam pertemuan antara orang tua dan anak secara komunikatif, dialogis dalam mencapai

tujuan pendidikan, maka situasi tersebut merupakan situasi yang kondusif bagi terbinanya suatu peristiwa pendidikan yang bermakna bagi anak.



Keluarga pada dasarnya memiliki potensi untuk menjalankan peran pendidikan, terutama melalui proses sosialisasi bagi anak-anaknya. Newmann (1975) menyebutkan hal itu dengan menunjukkan hal utama yang dipelajari anak adalah apa-apa yang mereka dapat dari orang tuanya. Keluarga merupakan kelompok primer yang dianggap mampu menjadi tempat pembentukan kepribadian. Hal ini amat dimungkinkan, sebagaimana diungkapkan Soelaeman (1992:53) bahwa keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama. Urgensi keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama, dapat dirangkum setidaknya disebabkan oleh beberapa hal:

- (a) urutan pertama secara kronologis dari pendidikan yang ditempuh anak dalam hidupnya.
- (b) masa pendidikan yang lebih lama, karena setelah anak masuk sekolah dan masyarakat, keluarga tidak lepas tangan dan pendidikan dalam keluarga tetap berlangsung dengan porsi waktu yang lebih luas.
- (c) pendidikan keluarga dipandang lebih intensif dilihat dari sudut hubungan antara orang tua dengan anak secara kodrati.
- (d) pandangan dan penghayatan orang tua bahwa anak merupakan amanat Allah SWT yang mengandung konsekuensi bahwa mereka

berkeharusan mengemban tanggung jawab untuk melindungi, membesarkan, dan mendidiknya.

Dari sisi anak, diakui bahwa menurut kodratnya anak memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri, tetapi dengan bantuan atau interaksi dan komunikasinya dengan orang lain, terutama dengan orang tuanya pengembangan diri itu akan lebih baik. Ditinjau dari sudut pendidikan, anak baru akan menjadi manusia dan memahami dirinya setelah ia hidup bersama dan berinteraksi dengan orang lain, dan terutama dengan kedua orang tuanya (Langeveld, 1980), disamping dinamika kepribadiannya secara internal dalam dirinya, dan pengaruh interaksinya dengan lingkungan fisik dan budaya (Kahn dan Wright, 1980).

Pendidikan demokrasi yang akan menjamin budaya politik (civic culture) dengan demokrasi yang stabil sebagaimana dilukiskan Almond dan Verba (1965) perlu memanfaatkan berbagai kelebihan yang dimiliki unit keluarga itu untuk mendukung pendidikan di sekolah. Perlunya pendidikan tersebut, mendorong untuk segera dilakukannya studi tentang bagaimana operasionalisasi pendidikan tersebut. Karena itu studi ini dianggap sebagai langkah penting yang selayaknya segera dilakukan.

Dalam pada itu, sekolah dalam misi pendidikan demokrasi ini juga tak kalah pentingnya. Sekolah bahkan merupakan tempat terbaik selanjutnya untuk melakukan pendidikan demokrasi, mengingat

keberadaannya yang didisain untuk itu. Kekuatan sekolah terletak pada disediakannya sarana fisik, non fisik, dan fasilitas yang dirancang sengaja dan terencana untuk melaksanakan program pendidikan. Dalam beberapa hal, sekolah melengkapi kekurangan yang ada pada keluarga. Dalam perkembangan zaman seperti sekarang ini, keluarga tidak mungkin lagi memenuhi semua tuntutan kebutuhan dan aspirasi generasi muda, terlebih lagi berkaitan dengan kebutuhan akan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, secara hipotetis diakui bahwa semakin maju suatu masyarakat akan semakin penting peranan sekolah.

Salah satu tuntutan yang seharusnya diakomodasikan sekolah ialah tuntutan akan fungsinya sebagai pusat pendidikan untuk menyiapkan manusia Indonesia sebagai individu, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia di masa depan. Kompetensi yang dibutuhkan untuk itu adalah mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia (sebagaimana dikehendaki UU No.2 /1989, khususnya pasal 3). Untuk mengimplementasikan misi ini, pendidikan sekolah dirancang secara sistematis (by design), dan inilah yang merupakan kelebihan pokok jika dibandingkan dengan keluarga.

Rancangan sistematis inilah yang menghasilkan kompetensi tertentu baik kompetensi yang secara langsung dirancang (instructional effect) melalui tujuan khusus pembelajaran, maupun dampak pengiring (nurturant



effect) yang menyertainya. Dampak pengiring pada umumnya terjadi berkat keterlibatan subjek didik yang terjadi secara bermakna dalam suatu pengalaman belajar tertentu. Intervensi model pendidikan ini diasumsikan amat relevan untuk mencapai kedua dampak yang dihasilkan itu.

Kedua seting pendidikan itu (baik dalam keluarga maupun sekolah) masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Karena itu, keduanya juga diasumsikan dapat berperan untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing. Pada saat yang sama keduanya dapat menampilkan kelebihannya masing-masing pula.

Pentingnya studi ini dilakukan juga didasarkan pada kenyataan, bahwa sejauh yang dapat diamati, pendidikan demokrasi baik di masyarakat dalam keluarga maupun di sekolah secara formal, masih belum mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya, sehingga aktualisasinya dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam lapangan pendidikan (IPS) belum dirasakan secara maksimal. Sangat boleh jadi, bahwa hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis moral yang meluas menjadi krisis sosial yang dikeluhkan banyak orang dewasa ini.

Urgensi pendidikan demokrasi juga berkaitan dengan banyaknya keluhan tentang kelemahan pembelajaran IPS di sekolah, sebagaimana ditunjukkan Sanusi (1998) seperti tersebut di atas. Dari sejumlah kelemahan itu, pada akhirnya pembelajaran IPS di sekolah melahirkan

output instrumental yang tidak kuat (*not powerfully instrumental output*), dan tidak mampu memberikan peluang kepada siswa untuk memberdayakan dirinya (*not for students self-empowerment*) (Sanusi, 1998:233). Karena itu, studi ini juga diharapkan mampu menawarkan diri sebagai suplemen alternatif bidang pendidikan demokrasi pada pendidikan IPS.

Dengan paparan di atas, maka secara lebih singkat diungkapkan pentingnya pendidikan demokrasi dalam pendidikan IPS dengan setting dialogis itu mendapatkan beberapa alasan yang kuat yang dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Kehidupan berbangsa dan bernegara dalam dekade terakhir, dianggap tidak kondusif bagi pendidikan yang ingin menumbuhkan sikap dan perilaku demokratis.
2. Realitas kehidupan masyarakat akhir-akhir ini menunjukkan fenomena tersebut. Kekacauan sosial (*chaos*) dan sikap mau menang sendiri, tanpa mau mendengar/menerima eksistensi pihak lain dapat kita saksikan dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Fenomena ini diduga merupakan akibat dari tidak berkembangnya sikap dan perilaku demokratis serta kurangnya upaya untuk itu secara bersungguh-sungguh.
3. Padahal, mantapnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat merupakan dasar bagi mantapnya budaya politik bangsa itu (Almond dan Verba, 1965).

4. Untuk memantapkan kehidupan yang demokratis, diperlukan upaya-upaya yang serius, meskipun membutuhkan waktu yang relatif cukup lama karena menyangkut sikap dan perilaku.
5. Pendidikan (demokrasi) merupakan alternatif yang dianggap paling layak dalam melakukan upaya-upaya penumbuhan dan pengembangan sikap dan perilaku demokratis tersebut.
6. Dalam upaya pendidikan (demokrasi), keluarga dan sekolah, memiliki potensinya masing-masing yang khas dan cukup meyakinkan. Dalam hal ini keluarga sebagai kelompok primer dalam masyarakat yang memiliki hubungan kondusif bagi perkembangan emosi para anggotanya merupakan lingkungan pendidikan yang pertama bagi anak-anak, sehingga mampu membangun kesan yang lebih dalam.
7. Pendidikan merupakan upaya manipulatif yang didasarkan pada prinsip-prinsip dasar antara lain prinsip psikologis. Pemanfaatan atribusi anak terhadap sikap dan perilakunya sehari-hari dianggap cukup signifikan dalam pendidikan demokrasi.
8. Demikian juga latihan untuk meningkatkan keasertifan amat dibutuhkan agar dapat membantu meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan yang lebih rasional dan demokratis.
9. Model pendidikan demokrasi yang diselenggarakan dalam setting dialogis dengan memanfaatkan prinsip-prinsip psikologis seperti

penggunaan atribusi, untuk membangun sikap dan perilaku demokratis serta tingkat keasertifan anak, belum banyak dilakukan, sehingga sekolah dan masyarakat kurang memiliki acuan yang secara praktis mudah dirujuk untuk melaksanakannya.

10. Karena itu, diperlukan suatu acuan tentang bagaimana pendidikan demokrasi itu diselenggarakan berdasarkan prinsip psikologis. Acuan itu dapat diwujudkan dalam bentuk *model pendidikan demokrasi dalam seting dialogis*, yang diharapkan dapat memainkan peran alternatif dalam pendidikan demokrasi bagi masyarakat.

Inilah beberapa hal yang menjadi latar belakang bagi dilaksanakannya studi tentang pendidikan demokrasi dalam seting dialogis untuk siswa SLTP. Pelaksanaannya akan didekati secara psikologis, sesuai kajian pendidikan IPS yang memilih bahan pendidikannya dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniti, dan diorganisasikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan (Somantri, 1994; Barr, 1977). Konsep atribusi yang berasal dari khasanah psikologi sosial akan diadopsi sebagai bahan dasar untuk meramu model pendidikan demokrasi dimaksud.

Dimensi-dimensi atribusi dipandang amat potensial untuk membangun sikap dan perilaku demokratis anak. Dimensi locus misalnya, berkaitan erat dengan pengokohan rasa keyakinan diri dan sikap toleran

serta perilaku yang lebih bertanggung jawab. Jika seseorang mengatribusikan sebab-sebab keberhasilan ataupun kegagalan sikap dan prilakunya yang telah lalu secara internal, maka ia akan lebih kosekuen, toleran dan bertanggung jawab, serta tidak mudah menyalahkan orang lain.

Prosedur lain yang juga akan dijadikan bahan bagi diramunya model pendidikan demokrasi ini ialah prosedur "pengelolaan konflik". Dalam prosedur ini diupayakan naiknya tingkat keasertivan anak, sehingga akan dapat dihindari sikap plin-plan dan mendua yang sangat merugikan kehidupan berdemokrasi. Akan tetapi tingkat keasertivan itu juga harus dipadukan dengan kemauan bekerja sama yang cukup, sehingga dapat dihindari sikap "memaksa" yang merupakan embrio bagi tumbuhnya sikap diktator dan otoritarianisme. Dalam penyelesaian konflik, sikap yang dianggap baik ialah "kolaboratif" bukan "pemaksaan" yang otoriter atau juga bukan "penghindaran masalah" yang cenderung memupuk sikap tidak bertanggung jawab.

Bagaimanapun, model yang disusun meskipun secara teoretis diakui keunggulannya, akan tetapi alternatif model itu tetap sebagai tawaran dengan keunggulan yang bersifat hipotetis. Karena itu model yang disusun dimaksudkan sebagai model konseptual yang akan diuji signifikansinya melalui studi eksperimentasi. Studi ini diharapkan

menghasilkan temuan empiris dan rekomendasi yang akan sangat membantu pencapaian tujuan pendidikan IPS seperti pemahaman, sikap dan perilaku demokratis. Karena itu, pelaksanaan studi ini dirasakan sangat diperlukan.

2. Identifikasi Masalah Penelitian

Sebagaimana dijelaskan pada paparan terdahulu, bahwa telah terjadi kelambanan budaya (*cultural lag*) yang mengarah kepada disorganisasi dan disintegrasi sosial yang merupakan indikator dari tidak atau kurang berfungsinya sistem sosial. Hal itu, menunjukkan pula akan kurang berfungsinya lembaga-lembaga sosial sebagai sub-sistem yang menopangnya. Kekuasaan diktator yang berlangsung berpuluh-puluh tahun di Indonesia telah merontokkan sendi-sendi hidup bermasyarakat dan bernegara. Meskipun elemen dan perangkat demokrasi secara formal ada (misalnya: pemilihan umum, pembagian kekuasaan), akan tetapi fungsi dari kelembagaan tersebut tidak dapat berjalan, sehingga tidak mampu memperagakan praktek hidup berbangsa secara demokrasi. Berbagai lapangan seperti politik, sosial, budaya dan terutama ekonomi, ikut rusak karenanya. Tak terkecuali sistem nilai yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai demokrasi yang mestinya menjadi landasan dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara juga telah ikut tereduksi.

Dalam masyarakat sering kita saksikan sikap yang mau menang sendiri, kurang mengakui keberadaan pihak lain, toleransi yang dirasakan semakin melemah, kurangnya empati dan sensitivitas terhadap penderitaan orang lain, dan banyak lagi indikasi semacam itu. Berbagai indikator yang muncul itu, ditengarai bermuara pada melemahnya sikap dan perilaku demokrasi tidak saja di kalangan elit politik, akan tetapi dirasakan di hampir semua lapisan. Padahal sikap dan perilaku demokrasi rakyat suatu bangsa merupakan dasar yang pokok bagi kokohnya budaya politik bangsa tersebut (Almond dan Verba, 1965). Karena itu masalah ini menjadi amat serius dan seharusnya menjadi perhatian banyak pihak. Fungsi-fungsi sistem sosial yang selama ini relatif tertekan dan tidak dapat tersalur, harus digerakkan lebih intensif lagi.

Hak setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar pasal 28, tertekan dan tak dapat tersalur, sehigga kontrolpun misalnya, tak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kekuasaan eksekutif (khususnya lembaga kepresidenan) yang terlalu kuat pada waktu itu menyebabkan tidak berfungsinya lembaga-lembaga yang lain secara baik.

Untuk memperbaikinya, ke depan pendidikan politik bagi warga negara (*citizenship education*) harus lebih ditingkatkan ketepatan arahnya,

agar setiap warga negara memiliki kemampuan mendukung terbentuknya masyarakat yang baik (*good society*) dalam bentuk partisipasi yang bertanggung jawab.

Dapat dipastikan bahwa masalah sikap dan perilaku termasuk sikap dan perilaku demokrasi merupakan bidang garapan ilmu pendidikan. Dalam upaya mencari solusi jangka panjang, tetapi strategis dalam meningkatkan kualitas sikap dan perilaku demokrasi, maka pendidikan jelas menempati peranan amat penting. Meskipun proses pendidikan sikap dan perilaku demokrasi diyakini memerlukan waktu yang cukup lama, namun kebutuhan untuk itu menuntut agar segera mendapat perhatian. Karena itu, pertanyaan yang segera muncul ialah, bagaimana pendidikan sikap dan perilaku demokrasi itu dapat dilaksanakan untuk kalangan masyarakat bangsa yang cukup luas?

Dalam konteks pendidikan sikap dan perilaku, sekolah juga dipandang sebagai institusi yang cukup kredibel, mengingat berbagai potensi yang dimilikinya. Keluarga merupakan kelompok primer yang membentuk masyarakat yang lebih luas. Disamping potensinya sebagai lingkungan pendidikan pertama yang dikenal anak-anak sehingga menciptakan kesan yang mendalam, keluarga juga merupakan arena dialogis hubungan dan kontak batin antara orang tua dengan anak-

anaknya (M.I. Soelaiman, 1992). Karena itu, dari segi pendidikan, terutama pendidikan sikap dan perilaku, keluarga diakui memiliki potensi yang amat menguntungkan. Sementara sekolah juga memiliki kelebihan sendiri yang khas. Kekuatannya terletak pada sarana dan programnya yang dirancang secara sistematis untuk melaksanakan pendidikan.

Pertanyaan lanjutan yang mengikuti pertanyaan sebelumnya ialah, bagaimana memanfaatkan potensi kedua institusi itu dalam pendidikan sikap dan perilaku demokrasi sebagaimana dimaksud pada paparan di atas? Dengan rumusan lain, bagaimana menyusun dan mengembangkan suatu rumusan model pendidikan demokrasi (dalam Pendidikan IPS) untuk siswa SLTP?

Upaya memodifikasi sikap dan perilaku demokrasi, pada prinsipnya diarahkan kepada penguasaan dan pemahaman (*competent*) akan nilai-nilai demokrasi, penguasaan rasa keyakinan diri dan mendapatkan pengakuan (*confident*), dan bertanggung jawab (*responsible*) untuk berpartisipasi dalam ikut menentukan arah perubahan (Chamberlin, 1992:30). Penguasaan dan pemahaman nilai-nilai demokrasi antara lain dijabarkan atas pengakuan kekuasaan Allah SWT yang mutlak, toleransi, menerima eksistensi perbedaan, berpikir kritis dan sistematis, memiliki empati dan

peka terhadap kesulitan orang lain, mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial masyarakatnya, dan lain-lain.

Rasa keyakinan diri (*confident*) dapat merupakan akibat dari kemampuan yang dimilikinya, yang secara psikologis memunculkan rasa berdaya diri (*self-efficacy*) dan rasa percaya diri (*self-esteem*). Baik kemampuan, keyakinan diri, maupun sikap bertanggung jawab yang dimiliki seseorang pada dasarnya merupakan akumulasi perolehan proses belajar yang dialaminya baik yang dilakukannya secara formal, efek ikutan (*nurturant effect*) dari proses belajar itu maupun belajar melalui proses mengalami dalam kehidupannya di tengah-tengah masyarakat.

Meskipun pada diri setiap orang terakumulasi berbagai kemampuan menurut kadarnya masing-masing, akan tetapi seringkali orang mengatribusikan kemampuan dirinya secara tidak tepat. Pada peristiwa keberhasilan, hilangnya rasa percaya diri dapat merupakan salah satu bentuk kesalahan mengatribusikan kemampuan dirinya, yaitu membuat anggapan yang salah bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan (dimensi atribusi internal). Atribusi yang salah seperti itu tidak kondusif bagi upaya mendorong meningkatnya kemampuan seseorang pada masa selanjutnya. Sebaliknya, pada peristiwa kegagalan, kesalahan mengatribusikan kegagalannya seringkali diwujudkan dalam bentuk pelemparan kesalahan



kepada pihak lain sebagai penyebabnya (Weiner, 1979). Peristiwa seperti ini dapat menghilangkan atau setidaknya menghalangi munculnya sikap toleran, empati dan perilaku bertanggung jawab. Dengan demikian, atribusi yang sesuai amat diperlukan agar keberhasilan dalam bersikap dan berperilaku demokratis dapat dipertahankan dan ditingkatkan, dan kegagalan dapat dikurangi dan mungkin dicegah. Sampai di sini timbul masalah, bagaimana memanipulasi atribusi anak dalam model pendidikan demokrasi, agar didapat atribusi yang lebih sesuai?

Dalam pendidikan sikap dan perilaku demokratis anak, juga tidak dapat dilepaskan dari kadar peranan kedua orang tuanya, atau salah satu dari keduanya, dalam kasus tertentu. Melalui pemodelan, anak terdorong untuk melakukan imitasi sikap dan perilaku orang terdekatnya seperti guru ataupun kedua orang tuanya, baik disadari ataupun tidak. Mikulas (1978:114) menyebutkan pentingnya pemodelan orang tua dan guru terhadap anak-anak. Ia menyebutkan bidang-bidang yang paling efektif dan secara signifikan berpengaruh melalui pemodelan orang tua terhadap anak-anak, yaitu bahasa, perilaku seksual, dan perilaku sosial.

Menurutnya, anak-anak juga mengakuisisi sikap prasangka dari orang tua mereka. Maka peranan orang tua diduga cukup penting dalam perkembangan sikap dan perilaku anak-anak. Ini berarti bahwa terdapat

kebutuhan yang lebih meningkat akan peran lembaga keluarga yang di dalamnya terdapat sosok orang tua sebagai model, dan di sekolah yang didalamnya terdapat sosok guru juga sebagai model. Di sini letak pentingnya kedua institusi tersebut dalam upaya ini.

Dalam konteks keluarga, maka dalam masyarakat Sunda, yaitu masyarakat tempat penelitian ini diselenggarakan, dikenal sebagai masyarakat yang demokratis? Profil masyarakat Sunda yang demokratis itu antara lain terungkap dalam falsafah *kasumedangan* (Ayatrohaedi, dkk., 1989:187), yang mengajarkan agar “semua manusia saling mengenal secara baik, sekali-kali tidak menimbulkan persengketaan yang dapat menimbulkan penderitaan, bersikap sabar dan toleran kepada sesama manusia”. Potensi seperti itu dalam penelitian ini masih bersifat hipotetis dan membutuhkan pembuktian secara empirik.

Sebagai anggapan yang diyakini masyarakat, seharusnya potensi tersebut dapat digali terus dan dikembangkan sebagai modal dan dapat dijadikan wahana pendidikan demokrasi bagi anak-anak dalam keluarga. Dalam konteks seperti ini maka, pengaruh sikap orang tua terhadap sikap dan perilaku anak juga dianggap penting untuk diakomodir dalam studi ini. Krena itu, ikut pula dikaji dalam studi ini tentang bagaimana pengaruh sikap orang tua tersebut terhadap sikap dan perilaku demokratis anak. Pertanyaan mengenai masalah tersebut juga perlu diajukan dalam konteks

studi ini.

Masalah penelitian juga akan muncul berkaitan dengan tawaran model yang disusun dan dimaksudkan sebagai tawaran alternatif. Bagaimanapun, model yang disusun meskipun secara teoretis diakui keunggulannya, akan tetapi alternatif model itu tetap sebagai tawaran dengan keunggulan yang bersifat hipotetis. Karena itu model yang disusun dimaksudkan sebagai model konseptual yang akan diuji signifikansinya melalui studi eksperimentasi. Studi ini diharapkan menghasilkan temuan empiris dan rekomendasi yang akan sangat membantu pencapaian tujuan pendidikan IPS seperti pemahaman, sikap dan perilaku demokratis. Karena itu, pelaksanaan studi ini dirasakan sangat diperlukan dengan keunggulan yang bersifat hipotetis. Karena itu model yang disusun dimaksudkan sebagai model konseptual yang akan diuji signifikansinya melalui studi eksperimentasi. Dalam kaitan ini, maka perlu pula diajukan pertanyaan yang perlu dipermasalahkan dalam penelitian, yaitu sejauh mana model yang disusun ini memiliki signifikansi yang kuat dalam membina/meningkatkan sikap dan perilaku demokratis?

3. Rumusan Masalah Penelitian

Paparan secara umum sebagaimana diungkapkan pada bagian terdahulu, menyiratkan pertanyaan pokok, yaitu “bagaimana menyusun suatu model interaksi pendidikan IPS untuk membangun masyarakat yang

berkehidupan kebangsaan yang demokratis? ” Setiap upaya pendidikan, tidak dapat melepaskan diri dari perhatiannya kepada karakteristik subjek didik yang bersifat kondisional. Dalam kaitannya dengan sikap dan perilaku demokratis, maka atribusi subjek terhadap peristiwa masa lalunya, baik berupa keberhasilan maupun kegagalannya dalam bersikap dan berperilaku demokratis ikut menentukan pada masa selanjutnya. Karena itu, diperlukan pula kajian tentang bagaimana memanfaatkan atribusi anak terhadap keberhasilan dan atau kegagalannya dalam bersikap dan berperilaku demokratis untuk mempertahankan dan meningkatkan sikap dan perilaku demokratis pada masa selanjutnya.

Paparan di atas, dengan demikian menyiratkan pertanyaan pokok dalam studi ini, yaitu:

3.1 Bagaimana menyusun suatu model interaksi pendidikan IPS untuk membangun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang demokratis dengan memanfaatkan atribusi anak terhadap keberhasilan dan kegagalannya dalam bersikap dan berperilaku demokratis sebelumnya?

Pertanyaan itu akan dijawab dengan menyusun model pendidikan demokrasi melalui dialog-dialog yang oleh Soelaeman (1992) disebut sebagai kegiatan keluarga yang cukup intens dalam rangka pendidikan keluarga. Model ini disusun berdasarkan konsep-konsep dan teori-teori

tentang pemanfaatan atribusi anak terhadap keberhasilan dan kegagalan mengenai pemahaman, sikap dan perilaku demokratisnya. Pemunculan keberhasilan dan kegagalan itu dilakukan melalui pengukuran sikap dan perilaku demokratis dengan menggunakan Skala Sikap, dan dengan memberikan sajian instrumen saling menilai yang disebut sebagai "Fair Fighting" yang memuat substansi dari nilai-nilai demokrasi.

Untuk kepentingan penelitian ini, model disusun dalam tahap-tahap perlakuan yang didasarkan pada konsep-konsep dan teori-teori yang mendasarinya, dalam suatu tahapan studi (tahap pertama) untuk menyusun suatu model konseptual. Dengan demikian, langkah ini dilaksanakan dalam bentuk studi laboratoris. Model konseptual menurut Saukah (1996) merupakan model yang bersifat analisis yang memberikan komponen-komponen produk yang akan dikembangkan serta keterkaitan antar-komponen.

Model konseptual yang telah disusun perlu diuji signifikansinya untuk mendapatkan informasi tentang efektivitasnya secara empiris. Untuk itu diperlukan tahapan kedua dalam penelitian ini yang dilaksanakan dalam bentuk eksperimentasi. Dalam tahapan ini, masalah-masalah penelitian yang dikemukakan ialah:

3.2 Apakah terdapat perbedaan antara keadaan sebelum perlakuan (prates) jika dibandingkan dengan keadaan sesudah pemberian

perlakuan melalui intervensi model (pascates)?

Rumusan masalah ini dapat dijabarkan secara lebih rinci ke dalam sub-sub masalah sebagai berikut:

- 3.2.1 Apakah terdapat perbedaan perolehan skor dalam pengukuran *atribusi* subjek antara sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan? Dengan rumusan lain, apakah subjek memiliki atribusi yang lebih sesuai setelah diberikan perlakuan melalui intervensi model pendidikan demokrasi dalam seting dialogis keluarga?
- 3.2.2 Apakah terdapat perbedaan perolehan skor dalam pengukuran sikap *mengakui bahwa kekuasaan adalah milik Tuhan*, yang diperoleh subjek antara sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan (intervensi model pendidikan demokrasi)?
- 3.2.3 Apakah terdapat perbedaan perolehan skor dalam pengukuran sikap *toleran*, yang diperoleh subjek antara sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan (intervensi model pendidikan demokrasi)?
- 3.2.4 Apakah terdapat perbedaan perolehan skor dalam pengukuran sikap *mau bekerja sama dengan orang lain*, yang diperoleh subjek antara sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan (intervensi model pendidikan demokrasi)?
- 3.2.5 Apakah terdapat perbedaan perolehan skor dalam pengukuran sikap *menghargai pendapat orang lain*, yang diperoleh subjek

- antara sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan (intervensi model pendidikan demokrasi)?
- 3.2.6 Apakah terdapat perbedaan perolehan skor dalam pengukuran sikap *memahami dan menerima perbedaan kultur dalam masyarakat*, yang diperoleh subjek antara sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan (intervensi model pendidikan demokrasi)?
- 3.2.7 Apakah terdapat perbedaan perolehan skor dalam pengukuran sikap *berpikir kritis*, yang diperoleh subjek antara sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan (intervensi model pendidikan demokrasi)?
- 3.2.8 Apakah terdapat perbedaan perolehan skor dalam pengukuran sikap *mau menyelesaikan konflik tanpa kekerasan*, yang diperoleh subjek antara sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan (intervensi model pendidikan demokrasi)?
- 3.2.9 Apakah terdapat perbedaan perolehan skor dalam pengukuran sikap *sensitif terhadap kesulitan orang lain*, yang diperoleh subjek antara sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan (intervensi model pendidikan demokrasi)?
- 3.2.10 Apakah terdapat perbedaan perolehan skor dalam pengukuran sikap dan sikap *mau berpartisipasi dalam kehidupan politik dan*

sosial yang diperoleh subjek antara sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan (intervensi model pendidikan demokrasi)?

- 3.2.11. Apakah terdapat perbedaan perolehan skor dalam pengukuran *perilaku demokrasi* subjek antara sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan?

Masalah yang memaparkan hubungan kausal antar variabel dan gambaran keterpengaruhann sikap demokratis ibu dan ayah, suasana kehidupan keluarga, dan atribusi subjek dirumuskan sebagai berikut:

- 3.3 Apakah terdapat pengaruh yang signifikan sikap demokratis *ibu* terhadap sikap dan prilaku demokratis anak?
- 3.4 Apakah terdapat pengaruh yang signifikan sikap demokratis *ayah* terhadap sikap dan prilaku demokratis anak?
- 3.5 Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara suasana/dinamika kehidupan keluarga dengan sikap dan prilaku demokratis anak?
- 3.6 Apakah terdapat pengaruh yang signifikan *hasil belajar PPKn* di sekolah terhadap sikap dan prilaku demokratis anak?

4. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan studi ini adalah untuk mengembangkan sebuah model pendidikan demokrasi yang ditawarkan sebagai alternatif dalam pendidikan demokrasi melalui interaksi dialogis. Model tersebut

disusun dengan spesifikasi pemanfaatan atribusi anak terhadap keberhasilan dan kegagalannya dalam bersikap dan berperilaku demokratis. Secara lebih rinci, studi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui beberapa aspek berkaitan dengan penyusunan model pendidikan demokrasi dan efektivitasnya, yaitu:

- 4.1 Mendapatkan model pendidikan demokrasi membangun atribusi yang sesuai bagi anak melalui pengelolaan reaksi emosional/afeksi yang kondusif terhadap peristiwa keberhasilan dan kegagalan dalam bersikap dan berperilaku demokratis, membangun sikap dan perilaku demokratis.
- 4.2 Mengetahui signifikansi pengaruh dari pemberian perlakuan dalam bentuk intervensi model pendidikan demokrasi terhadap peningkatan dan memelihara *sikap* demokratis anak, yang dijabarkan dalam aspek-aspek sikap mengakui bahwa kekuasaan adalah milik Tuhan, sikap toleransi, mau bekerja sama dengan orang lain, menghargai pendapat orang lain, memahami dan menerima perbedaan kultur dalam masyarakat, berpikir kritis, mau menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, sensitif terhadap kesulitan orang lain, dan sikap mau berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial.
- 4.3 Mengetahui signifikansi pengaruh dari pemberian perlakuan dalam bentuk intervensi model pendidikan demokrasi terhadap peningkatan dan memelihara *prilaku* demokratis anak, yang ditunjukkan dalam

bentuk peningkatan keasertifannya.

4.4 Mengetahui signifikansi pengaruh dari sikap demokratis *ayah* terhadap peningkatan *sikap dan prilaku demokratis* anak.

4.5 Mengetahui signifikansi pengaruh dari sikap demokratis *ibu* terhadap peningkatan *sikap dan prilaku demokratis* anak.

5. Manfaat Penelitian

5.1 Manfaat Teoretis

Studi ini dapat memberikan kontribusi kepada lapangan kajian Pendidikan IPS pada aspek pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi merupakan bagian penting dalam membangun budaya politik yang menopang stabilnya sistem politik yang demokratis. Almond dan Verba (1965) dalam suatu studi yang dilakukannya menyimpulkan bahwa mantapnya kehidupan demokrasi berkaitan erat dengan meresapnya budaya politik di kalangan warga negara. Kesimpulannya itu juga menyebutkan bahwa negara yang memiliki sistem demokrasi yang stabil seperti Inggris dan Amerika Serikat adalah negara bangsa didukung oleh budaya politik yang disebutnya sebagai "*Civic Culture*", yang telah meresap pada diri para warga negaranya, sehingga mampu mendukung stabilnya sistem politik yang demokratis.

Dari beberapa ungkapannya dapat ditangkap bahwa yang disebut oleh Almond dan Verba sebagai budaya politik merupakan salah satu



aspek dari sistem politik, yaitu *pola sikap politik yang diperagakan oleh sejumlah besar individu yang memiliki kewenangan sebagai warga negara pada suatu negara, yang disebutnya sebagai kompetensi politik.*

Indikator yang ditunjukkan dari kompetensi itu antara lain adalah:

(1) sadar akan pengaruh pemerintah terhadap dirinya, (2) mengikuti dan menaruh perhatian pada proses politik, (3) menyerap informasi politik, (4) memiliki pendapat tentang sejumlah masalah politik, (5) terlibat dalam pembicaraan/wacana politik, (6) leluasa membicarakan soal politik dengan siapapun, (7) memandang dirinya mampu mempengaruhi pemerintah/memiliki kontrol tertentu terhadap elit politik dan keputusan politik, (8) aktif menjadi anggota organisasi tertentu, (9) menyatakan kepercayaan terhadap lingkungan sosialnya, (10) memiliki kebanggaan nasional.

Sesuai dengan karakteristiknya yang khas dalam pendidikan IPS, maka studi ini memanfaatkan konsep-konsep psikologi disamping ilmu politik dan budaya. Konsep psikologi yang dimanfaatkan dalam studi ini antara lain atribusi anak terhadap keberhasilan dan kegagalan mengenai sikap dan perilaku demokratisnya. Pemunculan keberhasilan dan kegagalan itu dilakukan melalui pengukuran sikap dan perilaku demokratis dengan menggunakan Skala Sikap, dan dengan memberikan sajian Artificial Critical Incident berupa kasus-kasus yang memuat substansi dari nilai-nilai demokrasi. Dalam studi ini dilakukan pengelolaan atribusi melalui

pemberian perlakuan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesesuaian atribusi dan memunculkan reaksi emosional/afeksi yang kondusif bagi meningkat dan terpeliharanya kedua variabel (sikap dan perilaku demokratis) tersebut (Weiner, 1992).

Dalam kajian pendidikan IPS, pengembangan model pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan sikap dan perilaku demokratis di sekolah seperti pada studi ini, sejauh pengetahuan penulis belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, produk dari studi ini merupakan sesuatu yang dianggap baru. Karenanya pula, studi ini secara teoretis memberikan kontribusi yang cukup berharga dalam lapangan pendidikan IPS, untuk mencapai salah satu dimensi dari tujuan pendidikan IPS.

Salah satu manfaat teoretis yang amat jelas antara lain terletak pada kekuatannya dalam memberi isi pada teori pembelajaran IPS yang lebih memiliki karakteristik sebagai program pendidikan yang baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Jarolimeck (1986: 7-8), bahwa pembelajaran IPS hendaknya mampu menggambarkan secara lebih luas dari cakupan ilmu-ilmu sosial, humaniti dari pengalaman subjek (siswa), lebih banyak melibatkan siswa untuk berpartisipasi, memberi pengalaman belajar, dan memberi kesempatan lebih banyak kepada subjek untuk menentukan keputusan.

5.2 Manfaat Praktis

Studi ini menghasilkan produk berupa model pendidikan dalam interaksi dialogis di sekolah. Karena itu pada tingkat praktis, studi ini memberikan sumbangan pikiran alternatif, tentang bagaimana pendidikan demokrasi di sekolah dilakukan. Sebagai kelompok primer dari masyarakat, keluarga sekaligus memegang peranan penting dalam mengembangkan budaya politik yang demokratis di masyarakat. Karena itu, studi ini secara praktis amat diperlukan, apalagi dikaitkan dengan realitas kehidupan sosial yang dinamis pada setiap bangsa tak terkecuali masyarakat bangsa kita.

6. Batasan Istilah dan Definisi Operasional Variabel

6.1 Batasan Istilah

Dalam studi ini digunakan beberapa istilah yang bersumber dari beberapa disiplin ilmu pengetahuan seperti ilmu politik, sosiologi, dan psikologi. Beberapa istilah yang berkaitan langsung dengan variabel penelitian perlu diberikan batasannya agar dapat menjamin kejelasan makna yang dikandung dan terhindar dari ambiguitas yang dapat mengurangi nilai penelitian, apalagi meluas mengikuti pemikiran setiap orang. Pembatasan ini didasarkan pada kebutuhan studi meskipun tetap mengacu kepada definisi konseptual yang berlaku secara umum. Karena itu, istilah-istilah yang diberi batasannya dan digunakan dalam studi ini, berlaku secara kontekstual dalam lingkup studi ini.

6.1.1. Sikap

Konsep klasik tentang sikap dikemukakan oleh Gordon W. Allport, sebagaimana dikutip oleh Wibowo, dkk. (1988) bahwa sikap merupakan pernyataan mental dan kejiwaan tentang kesiapan yang terorganisir melalui pengalaman, memiliki pengaruh yang terkendali atau dinamis atas respon terhadap berbagai obyek dan situasi yang saling berhubungan. Wibowo juga mengutip batasan lain yang diberikan Krech dan Crutchfield yang menyebutkan sikap sebagai pengorganisasian motivasi, emosi, persepsi dan proses kognisi dengan respek terhadap berbagai aspek tentang dunia sekitarnya.

Definisi lebih spesifik dan karenanya dianggap lebih operasional dikemukakan oleh Tan Alexis S. (1981), bahwa sikap (*attitude*) memiliki 3 komponen, yaitu: (1) komponen kognitif berupa informasi atau pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang sesuatu obyek yang disikapi tersebut, (2) komponen afektif tentang bagaimana seseorang merasakan obyek sikap itu, biasanya ditunjukkan sebagai rasa suka atau tidak suka, dan (3) komponen konatif atau perilaku, yaitu bagaimana seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan obyek sikap itu.

Dalam penelitian ini, komponen ketiga dari sikap sebagaimana dijelaskan di atas, dipisah dalam bentuk variabel tersendiri, dan disebut

sebagai perilaku demokratis. Hal ini masiuh tetap dalam kerangka batasan yang dikemukakan Tan tersebut, yaitu yang disebutnya sebagai komponen konatif. Pemisahan dilakukan untuk mempertegas dan lebih menspesifikasi variabel penelitian.

6.1.2 Demokrasi

Rumusan tentang apa itu demokrasi secara umum amat beragam dan seringkali menjadi bahan diskusi yang cukup panjang. USIA (1991), misalnya mengungkapkan bahwa demokrasi merupakan konsep yang masih sering disalah pahami, sehingga dapat disalahgunakan oleh rezim-rezim totaliter dan diktator manakala mereka berusaha memperoleh dukungan rakyat dengan menempelkan label demokrasi. Ungkapan Abraham Lincoln yang terkenal itu memberikan gambaran umum bahwa demokrasi adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Sebagai ungkapan umum memanglah dirasakan tidak cukup. Secara singkat, demokrasi diartikan sebagai *pelebagaan* dari kebebasan, yaitu seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, yang mencakup seperangkat praktek dan prosedur tertentu.

Sebuah konferensi tentang Pendidikan Kewrganegaraan untuk mewujudkan Masyarakat Sipil, di Bandung, Maret 1999, menyimpulkan bahwa demokrasi secara konseptual adalah merupakan kerangka berpikir

yang mengakui kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang secara universal telah diakui sebagai nilai-nilai ideal, norma, sistem sosial, pengetahuan setiap orang, sikap dan perilaku yang secara substansial berlaku secara kontekstual, dihargai dan berkembang.

Selanjutnya, USIA (1991) juga menjelaskan bahwa dalam demokrasi, pemerintah hanyalah salah satu unsur yang hidup berdampingan dalam suatu struktur sosial dari lembaga-lembaga yang banyak dan bervariasi, partai politik, organisasi dan asosiasi. Artinya, demokrasi tidak hanya diperlukan dalam konteks kehidupan politik dalam berbangsa dan bernegara, akan tetapi demokrasi juga diperlukan dalam setiap tataran kehidupan masyarakat yang didalamnya memuat bentuk-bentuk interaksi antar anggotanya. Pola pikir yang demikianlah yang menjadi acuan bagi dilakukannya pembatasan istilah secara kontekstual sesuai konteks penelitian ini.

Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini diberikan batasan tentang demokrasi dalam pengertian yang lebih sempit, bahwa yang dimaksud dengan demokrasi ialah pemahaman, sikap dan perilaku seseorang yang mengacu kepada keyakinan bahwa hakekat kekuasaan hanyalah milik Tuhan semata, toleran, penerimaan terhadap budaya yang berbeda pada masyarakat, menghargai pendapat orang lain, sensitif dan mau membantu kesulitan orang lain, dan kemauan berpartisipasi dalam

lapangan sosial dan politik (diramu dari: Sanusi, 1998 dan 1999, Cogan, 1997, dan Wright, 1996).

Dalam kaitannya dengan ungkapan bahwa secara umum demokrasi adalah kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dapat dijelaskan bahwa kekuasaan pada dasarnya tetap dari Tuhan diberikan kepada manusia sebagai amanat. Dalam proses menyelenggarakan amanat tersebut rakyat mengamanatkannya lagi kepada yang dipilih untuk menyelenggarakan kekuasaan/amanat itu untuk kepentingan keselarasan hidup dan kemakmuran rakyat.

6.1.3 Konflik

Galvin dan Brommel (1982:176) mendefinisikan konflik sebagai proses yang di dalamnya melibatkan dua atau lebih anggota keluarga yang masing-masing meyakini bahwa apa yang mereka inginkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan anggota keluarga lainnya. Konflik seperti ini dapat berkembang menjadi lebih luas dengan perbedaan sikap atau nilai-nilai yang dianut. Konflik juga dapat muncul ketika rasa percaya diri (self-esteem) salah satu pihak merasa terancam. Jika setiap orang dapat mencapai tujuannya, maka konflik tidak akan muncul. Dikatakannya pula bahwa konflik terjadi apabila perilaku salah seorang/pihak atau keinginannya menghalangi tujuan yang akan dicapai pihak lainnya dalam

bentuk yang melewati nilai-nilai, perilaku, atau kekuasaan dan tujuan yang akan dicapai oleh setiap pihak itu berlawanan.

Dari sudut pandang sosiologis, Coser (1967) menyebutkan bahwa konflik merupakan hasil atau juga sesuatu yang menghasilkan perubahan. Dalam konteks keluarga, maka perubahan itu dapat berupa trauma akibat perceraian, kematian, akibat kehilangan pekerjaan, dan lain lain yang akan membawa dampak perubahan sikap dalam sistem keluarga.

Menurut Galvin dan Brommel (1982) konflik dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu konflik yang realistik dan yang non-realistik. Konflik yang realistik adalah konflik yang diarahkan kepada meningkatnya kondisi dan hak-hak anggota dalam suatu komunitas agar menjadi lebih realistik. Sedangkan konflik non-realistik dapat merupakan akibat dari frustrasi yang disebabkan oleh anggota keluarga atau pihak lain yang berlawanan sehingga konflik menjadi berkepanjangan tanpa penyelesaian akhir. Seperti perilaku yang dapat menghasilkan amarah yang tak terkendali (*misdirected anger*) atau kesalahan yang tak terselesaikan sehingga menyebabkan adanya korban. Agar konflik menjadi realistik, maka komunikasi haruslah dilakukan secara langsung diantara para pihak dan melibatkan mereka dalam setiap masalah.

Dalam konteks penelitian ini diberi batasan bahwa yang dimaksudkan dengan konflik adalah munculnya keinginan, atau pendapat

yang berbeda diantara dua atau lebih orang yang melalui proses secara realistik dapat diselesaikan dengan mengacu kepada penghargaan setiap keinginan dan pendapat para pihak tersebut. Konflik dengan demikian dapat bernilai positif, manakala dikelola dengan baik yang mengacu kepada penghargaan para pihak.

6.1.4 Atribusi

Atribusi adalah konsep psikologi sosial yang dimaksudkan sebagai upaya memodifikasi perilaku (behavior modification) yang dilakukan melalui olah kognitif, yaitu proses mempersepsi dan menjelaskan sebab-sebab munculnya suatu peristiwa tertentu oleh seseorang yang dapat mempengaruhi perilakunya (Mikulas, 1978: 136). Pentingnya konsep atribusi pada dimensi ini juga dijelaskan Berk (1989) yang menyebut salah satu fungsinya yaitu "*to make behavior meaningful and understandable*", yang merupakan kata kunci dalam pendidikan sikap dan perilaku. Oleh karena pengaruh yang ditimbulkan itu datang dari dalam (internal), maka Mikulas menyebut perlakuan yang memanfaatkan atribusi ini sebagai bagian dari pendekatan *self-control*.

Melakukan analisis, menafsirkan dan memahami berbagai penyebab suatu peristiwa atau perilaku amat penting sebagai dasar bagi berkembangnya perilaku yang akan datang yang lebih bermakna. Inilah

konsep dasar atribusi yang antara lain dikembangkan Weiner (1979, dan 1992). Menurutnya, bagaimana anak mengatribusikan faktor-faktor penyebab munculnya perilaku keberhasilan atau kegagalan terhadap performansi yang dicapainya amatlah penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap pencapaian performansi selanjutnya. Atribusi anak terhadap faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan menurut penafsiran anak, akan dapat memelihara dan meningkatkan performansi keberhasilan dalam bersikap dan berperilaku, pada masa yang akan datang (Weiner, 1979 dan 1992).

6.1.5 Perilaku Asertif

Perilaku asertif adalah ekspresi diri seseorang dalam bentuk kejujuran, langsung dan tegas dalam keakraban yang terrefleksi dalam isi dan gaya ketika berkomunikasi (Gordon, 1991: 308). Ketika dihadapkan kepada situasi interaksi dalam masyarakat, maupun dalam konteks yang lebih sempit seperti keluarga, setiap orang akan menampilkan reaksi yang berbeda-beda. Gordon (1991) dan Apriatman (1997) menjelaskan bentuk-bentuk reaksi itu, diantaranya reaksi yang menerima begitu saja atau mengalah atau bahkan diam saja tak ada reaksi. Perilaku yang tercermin dalam pemberian bentuk reaksi seperti ini biasanya disebut sebagai perilaku *submisif*. Perilaku submisif disebut oleh Gordon (1991:308) sebagai

perilaku *nonassertive*). Akan tetapi terdapat pula bentuk reaksi yang cenderung menyerang kembali terhadap respon lingkungan masyarakat sekitar, atau mempertahankan diri secara emosional. Perilaku yang tercermin dalam reaksi seperti itu, biasanya disebut sebagai perilaku *agresif*.

Perilaku yang dianggap lebih sesuai dan lebih memadai ialah apa yang disebut sebagai perilaku *asertif*. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pada prinsipnya perilaku asertif itu menampilkan diri dalam bentuk mempertahankan haknya, tanpa melanggar hak orang lain. Prinsip ini pulalah yang sebenarnya menjadi isi pokok dari perilaku *demokratis*. Dasar yang digunakan dalam berperilaku seperti ini ialah memperlihatkan pengertian kita terhadap keadaan/posisi, pandangan, kebutuhan, pikiran dan perasaan orang lain. Akan tetapi tidak memandang bahwa orang lain itu lebih penting, atau diri sendiri yang lebih penting. Yang ada ialah bahwa diri sendiri maupun orang lain adalah sama-sama penting, karena setiap orang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing.

6.1.6 Keluarga

Yang dimaksud dengan keluarga dalam penelitian ini adalah keluarga inti, yaitu suatu unit terkecil dalam masyarakat yang anggota-anggotanya terdiri dari seorang ayah, seorang ibu dan seorang atau

beberapa orang anak. Dalam konteks penelitian ini keluarga berperan sebagai lingkungan pendidikan yang utama bagi anggota-anggotanya (Soelaeman, 1992:53). Peran seperti itu juga diungkapkan Anderson dan Carter (1994:137) sebagai berikut:

The family is the primal group in which learning how to learn begins. The child is taught how to learn before anybody is aware of teaching, and the learning of the child how to learn teaches the parents how to teach as well. And all this occurs long before the child has ever learned the word "why?" This nonsequential experience is biologically important.

Keluarga adalah kelompok penting yang pertama tempat orang memulai belajar tentang bagaimana belajar. Anak diajar tentang bagaimana belajar sebaik-baiknya oleh orang tua sebelum orang lain memberi pelajaran. Dan hal itu berlangsung jauh sebelum seorang anak belajar tentang kata-kata "mengapa?" Pengalaman ini meskipun tidak berurutan secara biologis amat penting.

6.1.7 Model

Model, dalam konteks studi ini dimaksudkan sebagai bentuk atau pola aktivitas bersifat prosedural yang memiliki tujuan pendidikan dan dapat diacu untuk aktivitas yang serupa sesuai karakteristik yang dimilikinya. Dalam studi ini terdapat 2 macam istilah model, yaitu model konseptual dan model akhir. Model konseptual dimaksudkan sebagai model yang dihasilkan dari studi kepustakaan sebagai model yang akan

diuji kesahihannya melalui proses uji coba dalam bentuk verifikasi "expert judgement", tanggapan khalayak sasaran, maupun studi experimentasi.

Menurut Saukah (1996) model konseptual merupakan model yang bersifat analisis yang memberikan komponen-komponen produk yang akan dikembangkan serta keterkaitan antar-komponen. Model ini disusun berdasarkan konsep-konsep dan teori-teori tentang pemanfaatan atribusi anak terhadap keberhasilan dan kegagalan mengenai sikap dan perilaku demokratisnya. Model akhir dimaksudkan sebagai model konseptual yang sudah diuji kesahihannya baik melalui proses uji coba maupun studi eksperimentasi.

6.2 Definisi Operasional Variabel

Pelitian ini melibatkan 7 (tujuh) variabel yang terdiri dari 2 variabel bebas, 2 variabel terikat, 2 variabel moderator dan 1 variabel antara. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: (1) pengelolaan atribusi subjek yang menjadi salah satu komponen penting dalam model, dan (2) penggunaan teknik "fair fighting" sebagai bahan dialog yang pada intinya merupakan proses saling mengevaluasi. Variabel terikat terdiri dari: (1) sikap demokratis, dan (2) perilaku demokratis subjek. Keduanya diduga sebagai akibat dari diberikannya perlakuan pada variabel bebas. Variabel moderator adalah : (1) sikap demokratis ibu, dan (2) sikap demokratis ayah. Sedang variabel antara adalah tingkat atribusi subjek.

6.2.1 Pengelolaan Atribusi

Yang dimaksud dengan pengelolaan Atribusi dalam penelitian ini ialah upaya meningkatkan proses mempersepsi (atribusi) siswa terhadap kegagalan dan keberhasilannya dalam bersikap dan berperilaku demokratis, agar lebih sesuai, yaitu lebih internal, non-stabil dan terkontrol. Upaya ini dilakukan melalui identifikasi atribusi siswa, menghubungkan tingkat atribusi dengan nilai-nilai demokrasi, optimalisasi dengan pemaknaan/refleksi dan pemberian contoh-contoh. Variabel ini ditempatkan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini. Katagori kegagalan atau keberhasilan itu diidentifikasi berdasarkan hasil pengukuran dengan skala sikap dan teknik saling mengevaluasi yang disebut dengan "fair fighting". Disebut berhasil apabila dari masing-masing pengukuran itu mendapatkan skor 70% benar, sedangkan disebut gagal apabila skor yang mereka dapat di bawah itu.

Pengelolaan atribusi ini dilakukan dan menjadi salah satu langkah dalam intervensi model yang dilaksanakan dalam bentuk pemberian perlakuan kepada subjek penelitian. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen Skala Atribusi sebagaimana terlampir.

Dari aspek psikologis, model pendidikan demokrasi ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kognitif atribusional yang lebih sesuai

(adjastif) terhadap pengalamannya dalam bersikap dan berperilaku demokrasi yang telah dijalani dalam kehidupannya. Dengan kemampuan ini, seorang individu secara motivasional akan lebih optimis untuk berperilaku lebih demikratis pada masa yang akan datang.

Para ahli psikologi yakin bahwa dengan atribusi yang sesuai (berdimensi internal, tidak stabil dan terkontrol) seorang individu akan bersikap tidak mudah menyalahkan orang lain pada peristiwa kegagalannya, akan tetapi lebih kepada kesadaran diri bahwa kegagalannya merupakan kekurangan yang dimilikinya. Pada saat yang sama, ia akan lebih menghargai penilaian yang diberikan pihak lain. Ini adalah bentuk yang identik dengan kemampuan menghargai pendapat orang lain, yang merupakan salah satu nilai demokratis yang dikembangkan dalam studi ini. Dengan demikian, terdapat urutan hipotetis yang menerangkan hubungan berbagai variabel itu, yaitu bahwa atribusi yang sesuai akan meningkatkan sikap demokratis anak, sedangkan sikap demokratis akan diaktualisasikan dalam prilaku demokratis.

6.2.2 Asertifitas Perilaku

Perilaku asertif adalah ekspresi diri seseorang dalam bentuk kejujuran, langsung dan tegas dalam keakraban yang terrefleksi dalam isi dan gaya ketika berkomunikasi, dengan ciri-ciri mampu menyadari hak

pribadi dan mengakui dan tidak melanggar hak orang lain, menerima tanggung jawab yang melekat dalam hak, mengekspresikan pendapat, maupun pikiran dan perasaan secara wajar dan tulus. Pola pikir yang mendasari ialah bahwa diri sendiri maupun orang lain sama-sama penting, setiap orang sama-sama memiliki hak dan tanggung jawab.

Agar lebih jelas, variabel ini dibandingkan dengan konsep perilaku submissif dan perilaku agresif. Perilaku submissif adalah bentuk reaksi tertentu dalam berinteraksi yang diwarnai dengan ciri-ciri antara lain; menerima begitu saja atau mengalah atau bahkan diam saja tak ada reaksi, gagal mempertahankan hak, gagal menyampaikan pendapat, pandangan, pikiran, maupun kebutuhannya. Pola pikir yang mendasari ialah perasaan bahwa orang lain lebih penting, orang lain memiliki kontribusi lebih besar, dan dorongan untuk mengakomodasi kepentingan orang lain semaksimal mungkin. Sedangkan perilaku agresif adalah bentuk reaksi yang cenderung menyerang kembali terhadap respon lingkungan masyarakat sekitar, atau mempertahankan diri secara emosional. Ciri-cirinya antara lain mempertahankan haknya dengan mengabaikan hak orang lain, mengekspresikan pikiran, pendapat, pandangan yang seringkali tidak mengenakkan orang lain, cenderung menyerang kepentingan orang lain untuk kepentingan sendiri. Pola pikir yang mendasari antara lain anggapan bahwa dirinya lebih penting daripada orang lain, dirinya lebih berhak

daripada orang lain, dan kontribusi dirinya dalam masyarakat lebih besar.

Untuk menjadi orang yang berperilaku demokratis, maka dirinya haruslah diarahkan kepada karakteristik dan dasar pemikiran yang digunakan dalam perilaku asertif, karena karakteristik perilaku asertif sebagian besar atau bahkan semuanya adalah inheren dengan karakteristik perilaku demokratis. Variabel perilaku asertif diukur dengan alat ukur yang disebut dengan Pengukuran Indikator Perilaku Asertif (PIPA).

6.2.3 Teknik "Fair Fighting" (saling mengevaluasi secara adil)

Teknik "*fair fighting*" dimaksudkan sebagai teknik saling mengevaluasi secara adil, yaitu evaluasi yang didasarkan pada prinsip obyektivitas, tanpa dicampuri oleh tujuan atau motif lain yang mengarahkan pada sikap subjektif penilai. Materi penilaian diangkat dari nilai-nilai demokrasi yang telah diidentifikasi dan disusun untuk keperluan penelitian ini (lihat pada Bab II: studi kepustakaan). Hasil dari teknik ini, ditanggapi oleh subjek yang dinilai dan akan memunculkan konflik yang akan diselesaikan melalui dialog. Karena itu skor yang dihasilkan selain dijadikan bahan untuk merangsang dan menggali tanggapan dan atribusi subjek, skor yang dihasilkan juga dimanfaatkan sebagai hasil pengukuran perilaku demokratis.

Dalam studi ini, interaksi antara seorang individu dengan lingkungannya dirancang dalam seting dialogis antar sesama siswa dan

antara siswa dengan guru untuk subjek penelitian di sekolah melalui evaluasi terhadap perilaku demokratisnya yang dijamin dengan teknik "*fair fighting*" tersebut.

6.2.4 Sikap Demokratis Ibu dan Ayah

Sikap demokratis ibu dari subjek demikian juga ayah, meskipun tidak dilakukan manipulasi tertentu, akan tetapi diduga dapat pula berakibat/berpengaruh secara signifikan terhadap sikap dan perilaku demokratis anak sebagai variabel terikat. Karena itu, sikap demokratis ibu dan ayah dijadikan sebagai variabel moderator. Variabel ini akan diukur dengan menggunakan skala sikap yang juga digunakan untuk mengukur sikap demokratis anak.

Dalam beberapa literatur memang mengindikasikan hal itu. Lamb (1982) misalnya, melalui studi longitudinalnya menyimpulkan bahwa pengalaman awal seseorang yang didapat dari kedua orang tuanya, secara signifikan memiliki implikasi perkembangan yang kompleks terhadap berbagai aspek sosio-emosional dan prilakunya untuk waktu yang lama. Studi yang dilakukannya itu juga menyebutkan bahwa ayah lebih dominan dalam memberi pengaruh terhadap sikap dan perilaku anak laki-laki.

6.2.5 Hasil Belajar PPKn

Hasil belajar PPKn dianggap dianggap mencerminkan pemahaman subjek terhadap konsep demokrasi, mengingat pelajaran PPKn

memberikan materi yang membelajarkan konsep demokrasi dan bertujuan menumbuhkan sikap demokratis. Pemahaman subjek terhadap konsep tentang demokrasi ini juga dilihat pengaruhnya terhadap sikap dan perilaku demokratisnya. Akan tetapi terhadap variabel ini tidak dilakukan manipulasi apapun. Data variabel ini diambil dari dokumentasi nilai hasil belajar pada mata pelajaran PPKn yang telah terkumpul di buku nilai yang dimiliki guru.

Hasil belajar mata pelajaran PPKn siswa ditempatkan sebagai variabel modertaor dalam penelitian ini, karena meskipun tidak dilakukan manipulasi apapun, akan tetapi diduga bahwa pemahaman terhadap konsep demokrasi yang dimiliki siswa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan sikap dan perilaku demokratis siswa sebagai subjek penelitian.

6.2.6. Atribusi Subjek

Atribusi subjek dalam penelitian ini sebagaimana disebutkan di atas adalah tingkat/kualitas yang dimiliki siswa dalam *proses mempersepsi dan menjelaskan sebab-sebab munculnya suatu peristiwa tertentu* oleh seseorang yang dapat *mempengaruhi prilakunya*. Proses tersebut dilakukan melalui upaya memodifikasi prilaku (behavior modification) yang dilakukan melalui olah kognitif (Mikulas, 1978: 136). Fungsi memodifikasi itu juga dijelaskan Berk (1989) yang menyebutkan salah satu fungsinya sebagai *"to make*



behavior meaningful and understandable". Hal ini menjadi kata kunci dalam pendidikan sikap dan perilaku. Atribusi subjek akan diukur dengan menggunakan skala atribusi.

6.2.7. Sikap Demokratis

Sikap demokratis dalam penelitian ini ditempatkan sebagai salah satu variabel terikat, karena diduga merupakan akibat atau dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas seperti pengelolaan atribusi subjek, tingkat atribusi, latihan berperilaku asertif, dan teknik fair fighting. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sikap demokratis ialah pernyataan mental dan kejiwaan sebagai pengorganisasian motivasi, emosi, persepsi dan proses kognisi tentang demokrasi dengan respek terhadap berbagai aspek tentang dunia sekitarnya.

Implementasinya terwujud dalam bentuk pengakuan bahwa kekuasaan adalah amanat Allah Swt, toleran, mengakui kesamaan derajat dan menghargai pihak lain, mau bekerja sama dengan orang lain, menghargai pendapat orang lain, menerima dan menghargai perbedaan kultur dalam masyarakat, peka terhadap kesulitan orang lain, berlaku adil, memiliki kemauan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial.

Variabel ini akan diukur dengan skala sikap yang dikembangkan oleh peneliti sendiri, dan telah melalui uji coba untuk mendapatkan kesahihannya. Materi instrumen ini dikembangkan berdasarkan nilai-nilai

yang terkandung dalam konsep demokrasi sebagaimana disebutkan di atas.

6.2.8. Perilaku Demokratis

Perilaku demokratis adalah variabel terikat berikutnya, yang juga diduga merupakan variabel yang muncul akibat dari dilakukannya manipulasi variabel bebas melalui intervensi model pendidikan demokrasi ini. Perilaku demokratis dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai implementasi lebih lanjut dari sikap demokratis yang muncul dalam bentuk perilaku/perbuatan sehari-hari. Oleh karena itu, variabel ini dianggap cocok diukur melalui penyajian kasus tentang kehidupan sehari-hari yang memunculkan konflik, dan berisikan nilai-nilai demokrasi. Dalam penyelesaian konflik atas kasus-kasus tersebut yang diukur adalah tingkat kemauan kerja sama (kooperatif), dan tingkat keasertivan subjek (sebagaimana dijelaskan pada Bab III: Metode Penelitian).

6.2.9 Suasana Kehidupan dalam Keluarga

Suasana kehidupan keluarga dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai suasana hubungan interaktif dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Suasana keluarga juga diletakkan sebagai variabel moderator, mengingat variabel ini tidak dilakukan perlakuan apapun, tetapi diprediksi ikut mempengaruhi sikap dan perilaku demokratis subjek. Indikasi suasana kehidupan keluarga antara lain bagaimana kehangatan hubungan antara ibu dan ayah, anak dan ibu, serta anak dan ayah. Variabel ini diukur menggunakan angket dinamika kehidupan keluarga.

Formulasi keterlibatan berbagai variabel, serta prediksi keterpengaruhannya terhadap variabel terikat digambarkan dalam diagram Ishikawa (Fishbone) pada diagram 1.1.

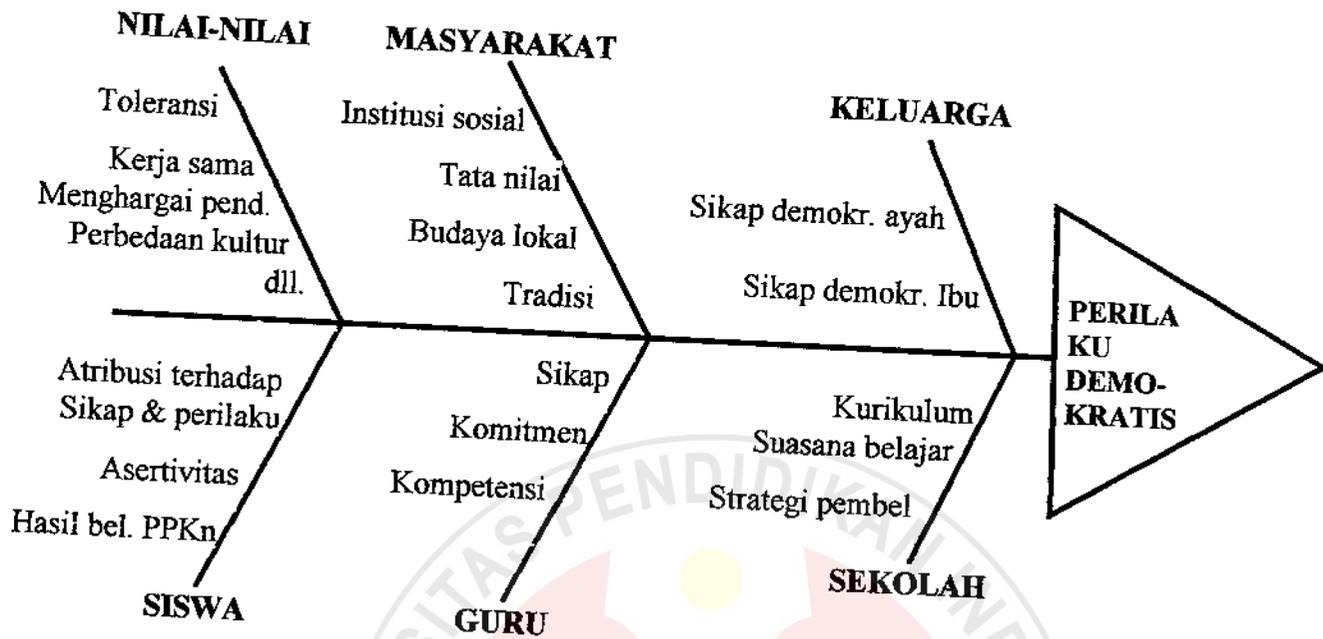


Diagram 1.1 Konteks keterlibatan berbagai variabel dan beberapa variabel yang dipilih dalam penelitian